

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mesir merupakan salah satu negara kawasan dunia Arab yang masih menganut tradisi patriarki. Masyarakat Mesir berpandangan bahwa derajat perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki. Masyarakat Mesir dengan konsep budaya patriarkinya menjadikan laki-laki sebagai satu-satunya pemilik kekuasaan mutlak dalam keluarga. Melihat dari kebudayaan Arab yang patriarkat serta pemahaman mereka terhadap tafsir teologi agama yang kurang kemudian melahirkan sejumlah ketimpangan dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Mesir adalah salah satu negara di Timur Tengah dengan tingkat kesetaraan perempuan yang rendah yaitu berada di posisi 136 dari total 145 negara, ranking ke 135 dalam gender gap di bidang partisipasi dan kesempatan ekonomi, kemudian berada di posisi 115 di bidang kesetaraan pendidikan dan juga dalam hal pemberdayaan politik perempuan Mesir berada pada posisi ke 136 (World Economic Forum, 2015). *The Gender Inequality Index (GII)* untuk Mesir telah mencatat nilai 0,565 pada tahun 2015 dan menempatkan Mesir di posisi 135 dari antara 159 negara.

Partisipasi politik penuh dan efektif oleh kaum perempuan termasuk dalam masalah hak asasi manusia, pertumbuhan inklusi dan pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan politik perempuan merupakan syarat esensial demokrasi pemerintahan dan dapat diukur baik dari segi hak hukum yang diberikan kepada perempuan untuk bisa memilih, mengekspresikan pendapat, dan mencalonkan diri untuk jabatan terpilih serta dalam pelaksanaan praktis dari hak-hak hukum. Berpartisipasi dalam lembaga publik seperti parlemen, dewan lokal atau pemerintahan memungkinkan perempuan untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan dan pembuatan hukum yang nantinya akan berdampak pada hak, perilaku dan hidup.

Perdebatan mengenai pentingnya partisipasi politik perempuan sudah ada sejak beberapa dekade lalu. Perdebatan tersebut menghasilkan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (The UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women - CEDAW) disahkan dan diterima oleh Dewan Umum PBB pada tahun 1979. Konvensi tersebut menjadi dasar perwujudan kesetaraan perempuan dan laki-laki dengan dibukanya akses dan peluang yang sama dalam ranah perpolitikan.

Sistem demokrasi menghendaki adanya hak dan kesempatan yang sama terhadap semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan, oleh karena itu keseimbangan partisipasi dan representasi politik antara perempuan dan laki-laki sangatlah penting. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga membentuk dasar dari undang-undang untuk menghapuskan diskriminasi atas gender dalam PBB 1948: pasal 1 dan 2.

Secara khusus *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang berisi tentang ketentuan khusus mengenai hak untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat dan kehidupan politik secara khusus (PBB 1966: pasal 25) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan berkesempatan tanpa ada perbedaan apapun yang kemudian disebutkan dalam pasal 2 yaitu:

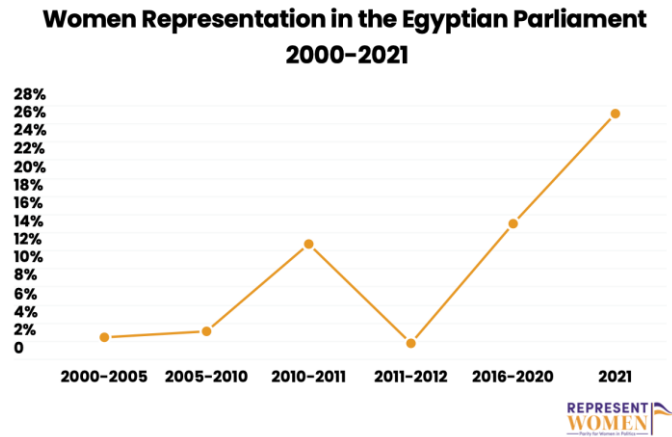
- Untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas;
- Memilih dan dipilih secara berkala dalam pemilihan umum yang bersifat universal dan hak pilih yang setara serta diadakannya pemungutan suara yang rahasia dan menjamin kebebasan berekspresi setiap pemilih.

Kurangnya keterwakilan perempuan yang terus-menerus terjadi terbukti dalam dominasi laki-laki di antara anggota parlemen, menteri kabinet, anggota

kehakiman, kepala daerah dan pemerintah daerah, kepala negara dan pemerintahan serta sektor swasta eksekutif (International IDEA, 2013).

Partisipasi perempuan di Mesir ditandai dengan keterlibatan aktif mereka pada tahun 1919. Pada tahun 1923, *Egyptian Feminist Union* (EFU) yang dipimpin oleh Hoda Shaarway dibentuk untuk mendukung revolusi dan pada tahun 1925 mereka menuntut hak perempuan untuk memilih dalam pemilihan. Pada tahun 1959, konstitusi Mesir memberi perempuan hak untuk memilih dan mencalonkan diri untuk pemilihan parlemen. Tahun 1957 merupakan awal dari masuknya perempuan ke dalam parlemen dengan delapan perempuan mencalonkan diri untuk parlemen dan dua kemenangan, yaitu Rawaya Attia untuk distrik Giza dan Amina Shoukry untuk Iskandariyah. Kemudian pada masa kepemimpinan Presiden Anwar Al Sadat dikeluarkan UU21/1979. Undang-undang tersebut mengalokasikan 30 kursi parlemen untuk perempuan yang kemudian berujung pada peningkatan signifikan terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen dari 8 menjadi 35 perempuan (Zeid, 2006). Momen ini diikuti dengan serangkaian perkembangan politik dan sosial ekonomi di masyarakat Mesir, termasuk pergeseran dari sistem satu partai ke sistem multi-partai dan dari pusat ekonomi pasar. Selanjutnya pada masa kepemimpinan Presiden Hosny Mubarak dikeluarkan keputusan Nomor 20 Februari 2000, yaitu pembentukan *National Council for Women* (NCW) sebagai lembaga independen yang berafiliasi dengan kepresidenan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan perempuan. Pada 25 Januari 2011 terjadi suatu revolusi yang menyerukan kebebasan, kesetaraan, keadilan dan demokrasi. Perempuan Mesir telah muncul sebagai aktor politik yang penting dan ikut berpartisipasi dalam pemilu sebagai pemilih maupun calon. Gelombang kedua revolusi 25 Januari meletus kembali dua tahun kemudian dengan tujuan menggulingkan rezim yang mengancam akan mengabaikan hak-hak yang telah diperjuangkan perempuan dan membalikkan pencapaian yang sudah dicapai untuk menciptakan kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 1.1 Diagram representasi perempuan di parlemen Mesir 2000-2021



Sumber: <https://medium.com/@representwomen/gender-quota-helps-women-win-in-egypt-8b58afc7a2a8>

Keadaan yang terjadi di Mesir sejak tahun 1965 adalah Undang-Undang menjamin kaum perempuan untuk bisa memiliki hak pilih penuh yang setara dengan kaum pria. Namun, hak-hak asasi bagi perempuan di Mesir masih dibatasi oleh mekanisme implementasi yang kurang sehingga akses terhadap keadilan dan hukum yang sama bagi perempuan masih belum terjamin. Kaum perempuan di Mesir juga memiliki pengaruh yang sangat terbatas, baik di tingkat nasional maupun komunitas.

Perubahan untuk bisa menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam politik merupakan perjuangan yang berat. Diskriminasi terhadap kaum perempuan ini sudah mengakar dalam kurun waktu yang lama dan berlangsung secara sistematis yang kemudian menjadi faktor penghambat bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di Mesir. Partai-partai Islam di Mesir, salah satunya garis keras Salafi telah memaksa kaum perempuan untuk menutup diri dan cukup mengurus kehidupan internal keluarga yang kemudian hal tersebut menjadi hambatan bagi kaum perempuan untuk berada dalam lembaga legislatif (Garcia & Ziada, 2012).

Andrea Aletta, 2023

KERJASAMA UN WOMEN DAN NATIONAL COUNCIL FOR WOMEN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI MESIR (2017-2022)
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Masalah ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki bukan pada apakah perempuan mampu berperan aktif dalam membangun demokrasi dan perdamaian karena pada kenyataannya mereka selalu berusaha untuk berkontribusi di banyak tingkatan, baik swasta maupun ruang publik. Kompleksitasnya terletak pada sistem yang sudah mengakar dan dinilai mendiskriminasi serta marginalisasi perempuan.

Terdapat dua asumsi dari penyebab ketidaksetaraan gender yang mempengaruhi kurangnya keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik menurut Seema Jayachandran dalam tulisannya yang berjudul *The Roots of Gender Inequality in Developing Countries* faktor itu adalah budaya dan ekonomi (Jayachandran, 2015). Penjelasan paling umum mengenai rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik adalah kurangnya calon perempuan yang berminat untuk mencalonkan diri. Masyarakat Mesir telah dipengaruhi kuat oleh argumen budaya yang menghambat partisipasi perempuan dalam ruang publik. Partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dapat dilihat sebagai tantangan terhadap peran sosial dan tradisional bagi perempuan dan juga merupakan upaya untuk membongkar tatanan sosial di Mesir.

Tradisi patriarki terhadap perempuan masih menjadi salah satu faktor utama penghambat partisipasi perempuan dalam ruang publik, terlihat pada cara memandang bahwa pekerjaan politik sebaiknya diserahkan kepada laki-laki. Perempuan seringkali dinilai kurang dapat meyakinkan orang lain, berdebat, bernegosiasi dan juga menciptakan aliansi politik yang efektif. Oleh karena itu, sikap inilah yang membuat sulit bagi perempuan untuk berkampanye di Mesir. Penjelasan selanjutnya yang menjadi penyebab rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik adalah ketimpangan ekonomi. Sikap patriarki tersebut juga bermanifestasi terhadap kekerasan berbasis gender. Sebuah studi pada tahun 2015 menemukan bahwa tingkat kekerasan pada perempuan di Mesir cukup tinggi. Hampir separuh perempuan yang pernah menikah usia 18-64 tahun di Mesir dilaporkan mengalami berbagai kekerasan dari pasangannya dengan 32% melaporkan kekerasan fisik dan 12% kekerasan

seksual (CAPMAS, 2015). Kemudian, ekonomi yang kurang beruntung juga berdampak langsung pada kemampuan perempuan untuk mengejar karir di bidang politik. Hal tersebut tentu dapat berpengaruh terhadap kampanye politik yang efektif dan juga memiliki sumber daya yang baik sebagai pendukung elektabilitas mereka.

Beberapa faktor tersebut sangat penting untuk diidentifikasi dan mengembangkan langkah-langkah dan strategi untuk mengatasi rendahnya partisipasi dan keterwakilan serta menutup kesenjangan gender dalam perpolitikan di Mesir.

Sejumlah organisasi internasional telah menjadikan isu diskriminasi terhadap perempuan yang sering terjadi di berbagai negara sebagai perhatian utama mereka. United Nations Women adalah salah satu organisasi multinasional tersebut (UN Women).

Pembentukan UN Women merupakan komponen dari gerakan global untuk memajukan hak-hak perempuan yang mencakup semua negara anggotanya. UN Women adalah bagian dari program reformasi PBB, menggabungkan sumber daya dan mandat untuk membawa perubahan dan memiliki dampak yang lebih besar, sangat meningkatkan inisiatif PBB untuk memajukan kesetaraan gender, meningkatkan peluang, dan menghapuskan diskriminasi secara global (UN Women, n.d.).

Sehubung dengan masalah kurangnya partisipasi perempuan dan kesetaraan peran perempuan dalam perpolitikan di Mesir, UN Women di Mesir kemudian membuat beberapa program untuk memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan dalam berpolitik di Mesir. UN Women bersama dengan organisasi nasional independen perempuan di Mesir yaitu *National Council for Women* (NCW) kemudian bekerjasama dalam berusaha meningkatkan partisipasi politik perempuan di Mesir. Dalam mendukung NCW terhadap peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai perpolitikan serta perannya, UN Women di Mesir membantu menjangkau 35.000 wanita di 27 gubernuran, mendorong mereka untuk memilih atau mencalonkan diri serta

Andrea Aletta, 2023

**KERJASAMA UN WOMEN DAN NATIONAL COUNCIL FOR WOMEN DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI MESIR (2017-2022)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

memastikan keterwakilan dan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Upaya kemitraan antara UN Women dan NCW sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di seluruh tingkatan.

Salah satu program dari UN Women dalam memperjuangkan kesetaraan dan partisipasi perempuan dalam berpolitik adalah dibuatnya *Women's Political Empowerment* (WPE). Melalui program WPE, NCW mendapat dukungan teknis maupun keuangan. UN Women bekerjasama dengan NCW untuk mengadvokasi dan menerapkan kegiatan hukum dan sosial untuk berkontribusi meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Dukungan UN Women kepada mitra nasional khususnya NCW sebagai lembaga yang diamanatkan untuk pemberdayaan perempuan melalui WPE merupakan komitmen internasional.

Dalam kemitraannya dengan NCW, UN Women terus mendukung pelaksanaan implementasi partisipasi politik perempuan di pos revolusi Mesir yang tentunya bertujuan untuk memajukan partisipasi dan representasi perempuan dengan mempromosikan keterlibatan mereka dalam kegiatan politik termasuk mencalonkan diri dan memilih dalam pemilu. Dukungan yang diberikan terutama di bawah program WPE disalurkan melalui pengembangan kapasitas kepada NCW dalam bentuk penyediaan saran teknis, produk pengetahuan, serta berbagai kesempatan pelatihan dalam manajemen proyek, perencanaan keuangan maupun pada berbagai isu substansif. UN Women juga mendukung kolaborasi antara pemangku kepentingan nasional yang terlibat dalam promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Peneliti telah menjabarkan beberapa poin penting dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini. Pertama, Hassan (2019) menyatakan bahwa ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan menyebabkan ketidaksetaraan hak-hak yang didapatkan oleh perempuan di Mesir. Patriarki masih sangat kental terjadi di negara Islam. Menurut Elafifiy (2013), reformasi hukum harus menjadi bagian dari upaya yang lebih luas dalam melawan budaya patriarki di Mesir.

Andrea Aletta, 2023

**KERJASAMA UN WOMEN DAN NATIONAL COUNCIL FOR WOMEN DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI MESIR (2017-2022)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Jamilah & Machmudi (2018) menyatakan bahwa terdapat dua faktor umum penghambat kesetaraan gender masyarakat Mesir. Pertama, perekonomian masyarakat Mesir masih didominasi sektor-sektor yang didasarkan pada kekuatan fisik terlebih lagi perempuan dianggap sebagai satu-satunya penanggung jawab rumah tangga yang mencegah mereka berpartisipasi dalam tenaga kerja. Kedua adalah faktor budaya yang memegang teguh nilai patriarki.

Kemudian Kandawasvika-Nhundu & Idea (2021) menyatakan bahwa peran kaum perempuan dalam partisipasi politik sangatlah penting. Pengakuan mengenai akses yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam proses politik dan pemilu sangatlah dipengaruhi oleh demokrasi intrapartai. Kemudian strategi pemberdayaan politik perempuan harus dilembagakan dan dipraktikkan dalam politik oleh berbagai pihak. Masih banyak pihak yang enggan melakukan reformasi internal untuk mempromosikan kesetaraan gender substantif antara perempuan dan laki-laki.

Khodair & Hassib (2015) menjelaskan mengenai peran dari NCW dalam perpolitikan perempuan di Mesir. Pembentukan NCW pada tahun 2000 adalah organisasi independent Mesir yang dibentuk untuk bahu-membahu dengan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan dan memperhatikan isu-isu kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan. NCW diakui sebagai salah satu aktor politik utama dalam proses pemberdayaan perempuan di Mesir. Namun, upaya NCW masih terbatas karena faktanya presentasi keterwakilan perempuan di parlemen Mesir masih sangat mengecewakan. Oleh karena itu dalam penulisan kali ini penulis akan menjelaskan upaya UN Women dalam membantu NCW meningkatkan partisipasi politik perempuan di Mesir. Kemudian, Taylor (2020) menjelaskan bahwa UN Women berperan untuk membentuk kebijakan, standar dan norma untuk membantu negara-negara anggota PBB dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender.

Setelah menjabarkan data-data di atas, peneliti mendeskripsikan mengenai peran kerjasama antara UN Women dan NCW. Setelah melihat

penelitian terdahulu peran dari NCW saja dinilai tidak cukup pampuh untuk bisa meningkatkan partisipasi politik perempuan di Mesir. Oleh karena itu peneliti akan membahas mengenai bagaimana kerjasama antara UN Women dan NCW melalui program Women Power Empowerment (WPE) dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Mesir.

1.2 Rumusan Masalah

Kurangnya partisipasi politik perempuan di Mesir merupakan masalah yang cukup rumit sehingga diperlukan kerjasama dari berbagai aktor. Baik aktor negara maupun aktor non negara.

Melihat dari latar belakang yang telah dijelaskan, fokus penelitian penulis lebih menekankan pada peran dari kerjasama antara UN Women dan *National Council for Women* dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Mesir. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu **“Bagaimana kerjasama antara UN Women dan National Council for Women dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Mesir?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah memberikan analisis terhadap kerjasama UN Women dan *National Council for Women* dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Mesir

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan bantuan tentang perkembangan partisipasi politik perempuan di Mesir bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa mendatang untuk menjadi bahan kajian. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para akademisi dan memberikan kontribusi kepada pemahaman tentang teori peran organisasi internasional dan bagaimana organisasi internasional berperan langsung menangani isu global.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat luas sebagai sumber informasi mengenai peran organisasi internasional dan isu partisipasi politik perempuan dalam perspektif hubungan internasional.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab yang di antaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup mengenai latar belakang permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini diantaranya adalah mengenai keterkaitan antara peran organisasi internasional dengan meningkatnya partisipasi politik perempuan di Mesir, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menyajikan teori-teori yang akan digunakan sebagai pendekatan analisis topik penelitian skripsi. Akan ada jurnal terkait peran dari UN Women dan NCW untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Mesir.

BAB III METODOLOGI

Bab tiga akan menjelaskan konsep serta teori apa saja yang diambil oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Bab ini akan membantu peneliti dalam memfokuskan pembahasan. Kemudian terdapat juga teknik pengumpulan data, sumber data, teknik keabsahan data, teknik analisis data, serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV DINAMIKA PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI MESIR

Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana tingkat partisipasi dan perkembangan politik perempuan di Mesir. Kemudian peneliti juga akan membahas tentang respon UN Women dan NCW terhadap rendahnya partisipasi politik perempuan di Mesir.

BAB V KERJASAMA UN WOMEN DAN NCW TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI MESIR

Pada bab ini menjelaskan bagaimana upaya kerjasama UN Women dan NCW dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Mesir. Penulis juga akan menjabarkan program-program yang dibuat oleh UN Women dan NCW dalam upayanya meningkatkan partisipasi politik perempuan di Mesir.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara singkat hasil keseluruhan penelitian dan output serta garis besar solusi dari isu ini. Serta diperkenankan akan adanya saran dan anjuran yang sekiranya dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.